



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

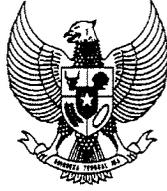
KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rangka pengawasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG
 PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER						
1.	Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> Laki-laki dan perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif karena keduanya berhak memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang pembangunan. Landasan hukum pembangunan kesetaraan gender dan penerapan strategi PUG di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Internal Kemen PPPA Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Akademisi Pakar/Ahli Gender Mahkamah Agung Kejaksaan Agung DPR/DPRD/DPD 	2024	<ul style="list-style-type: none"> Dalam tahap penyusunan naskah akademik dan draft RUU. Luncuran tahun 2019.
2.	Peraturan Menteri PPPA tentang Grand Design	Peraturan Menteri ini sebagai acuan bagi	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik,	<ul style="list-style-type: none"> Internal Kemen PPPA Kementerian 	2020	Dalam tahap perencanaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Peningkatan Partisipasi Politik	pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk menyusun dan mengefektifkan langkah operasional dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	PPN/Bappenas • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Dalam Negeri • Komisi Pemilihan Umum • Badan Pengawas Pemilu • LKPPM		
3.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Perdesaan/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai pedoman atau SOP yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemen PPPA dan/atau pemerintah daerah tentang kepemimpinan perempuan perdesaan/kelurahan.• Keberadaan perempuan di perdesaan/kelurahan mempunyai posisi dan peran strategis karena bersentuhan langsung dengan komunitas	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Kementerian Hukum dan HAM• Dinas PPPA• Kaukus Politik Perempuan Indonesia• LKPPM	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft.• Luncuran tahun 2019.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		perempuan sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu menjadi pemimpin dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.				
4.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih pada Pemilihan Umum	Sebagai pedoman atau SOP yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemen PPPA dan/atau pemerintah daerah bagi anggota legislatif perempuan.	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Dalam Negeri• Komisi Pemilihan Umum• Badan Pengawas Pemilihan Umum• Dinas PPPA	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft.• Luncuran tahun 2019.
5.	Peraturan Menteri PPPA tentang Anugrah Parahita Eka Praya	<ul style="list-style-type: none">• Materi muatan berisi indikator APE, evaluasi indikator APE, pedoman pelaksanaan penghargaan APE.• Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan	Sesdep Bidang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Pakar/Ahli Gender• Dinas PPPA	2020	Dalam tahap perencanaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>berkelanjutan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengacu kepada Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA.				
6.	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kemen PPPA tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan sinergi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan KKP dengan Kemen PPPA.• Memperbaharui kesepakatan bersama terdahulu antara KKP dengan Kemen PPPA No: 07/MEN-KP/KB/VI/2017; No:21/KPPPA/D.I/06/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah berakhir masa berlakunya.	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Kelautan dan Perikanan	2020	Dalam tahap penyusunan draft.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan	Untuk menyelenggarakan Sekolah Perempuan di daerah.	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap pengesahan (draft sudah diparaf oleh Wakil Bupati dan menunggu tanda tangan Bupati).• Luncuran tahun 2019.

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN						
8.	Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none">• Adanya perubahan wewenang untuk mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan.• Adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian/ lembaga yang berpengaruh pada keanggotaan Gugus Tugas PP-TPPO.• Adanya perubahan sumber pendanaan.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap harmonisasi.• Luncuran tahun 2019.
9.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan	Tindak lanjut dari rapat koordinasi GT PP TPPO Pusat pada tanggal 27	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana	Seluruh anggota Gugus Tugas PP TPPO tingkat pusat	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan.• Peraturan Presiden ini tidak masuk dalam



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024	Januari 2020 bahwa masa berlaku Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PP TPPO) Tahun 2014-2019 sudah habis sehingga perlu disusun RAN PP TPPO yang baru.	Perdagangan Orang			Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 sehingga untuk mendapatkan persetujuan Presiden maka harus diusulkan melalui izin prakarsa.
10.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Sebagai pedoman dalam rangka evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Kementerian Hukum dan HAM• BKKBN• Kejaksaan Agung• Mahkamah Agung• Polri	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap pembahasan.• Draft Peraturan Menteri telah selesai disusun pada tanggal 18 November 2019.• Draft Peraturan Menteri telah disampaikan Deputi Bidang PHP kepada Menteri PPPA dengan tembusan Sesmen dan Karo HH melalui Nota Dinas Nomor: ND.699/KPP-PA/D.II/11/2019 tgl. 21 November 2019.• Arahan Sesmen: perlu dipertimbangkan kembali mengenai penerbitan Peraturan Menteri ini,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
						diskusikan dengan SAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Biro HH. • Luncuran tahun 2019.
11.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja	Sebagai upaya melindungi pekerja perempuan dan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Ketenagakerjaan• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Kementerian Hukum dan HAM• Pemerintah Daerah• Polri• Pengelola Kawasan Industri• Serikat Pekerja	2020	<ul style="list-style-type: none">• Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.• Luncuran tahun 2019.
12.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Migran	Pelatihan diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia perempuan agar terhindar dari potensi kekerasan atau eksploitasi serta mewujudkan ketahanan ekonomi produktif yang berkelanjutan.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Ketenagakerjaan• Kementerian Luar Negeri• BNP2TKI• Pemerintah Daerah	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap harmonisasi.• Luncuran tahun 2019.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
13.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana	Sebagai pedoman untuk melindungi perempuan dan anak yang termasuk dalam kelompok rentan dari kekerasan berbasis gender selama masa pengungsian.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• BNPB• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan• Kementerian Hukum dan HAM• Kemenko Bidang PMK• Pemerintah Daerah• Lembaga Swadaya Masyarakat• Organisasi Masyarakat	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap pembahasan.• Luncuran tahun 2019.
14.	Peraturan Ketua Harian GT Pusat PP TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian GT Pusat PP TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat PP TPPO	<ul style="list-style-type: none">• Adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian/ lembaga yang berpengaruh pada keanggotaan Sub Gugus Tugas PP TPPO yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua Harian GT PP TPPO.• Semakin berkembangnya modus TPPO yang mendorong Kemen PPPA sebagai Ketua Harian untuk melakukan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none">• Anggota Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan.• Luncuran tahun 2019.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		penyesuaian keanggotaan di setiap Sub Gugus Tugas PP TPPO.				
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Grab Teknologi Indonesia tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan PPPA	Perlunya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan PPPA.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• PT Grab Teknologi Indonesia	2020	Dalam tahap finalisasi.

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK						
16.	Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Delegasi Pasal 71C ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Sesdep Bidang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Polri• Kejaksaan Agung• Mahkamah Agung• Kementerian Sekretariat Negara• Kementerian Kesehatan• Kementerian Sosial• Kementerian Hukum dan HAM• Kemenko Bidang PMK	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap harmonisasi.• Luncuran tahun 2019.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Kemendagri• KPAI• BNN• LPSK• Organisasi Masyarakat		
17.	Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak	Delegasi Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Kesehatan• Kementerian Sosial• Kementerian Sekretariat Negara• Polri• Kejaksaan Agung• Mahkamah Agung• Kemenko PMK• KPAI• Ikatan Dokter Indonesia	2020	<ul style="list-style-type: none">• Tertahan oleh Kemenko PMK sejak tahun 2018.• Dalam tahap pengesahan.
18.	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Pengaturan tentang: 1. kekerasan terhadap anak di Indonesia; 2. arah strategi dan tujuan khusus; dan 3. rencana aksi.	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Polri• Kejaksaan Agung• Mahkamah Agung• Kementerian Sekretariat Negara• Kementerian Kesehatan	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penyusunan draft.• Sudah masuk dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Sosial• Kementerian Hukum dan HAM• Kemenko Bidang PMK• Kemendagri• Kementerian PPN/Bappenas		2020.
19.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi	Delegasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Polri• Kejaksaan Agung• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Kementerian Agama• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Dinas PPPA	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap harmonisasi.• Luncuran tahun 2019.
20.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian	<ul style="list-style-type: none">• Masih adanya hambatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan hukum dan Stigmatisasi	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Mahkamah Agung• Kejaksaan Agung• Polri	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap pengesahan (penandatanganan para pihak).• Luncuran tahun 2019.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.		<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Kesehatan• Kementerian Sosial• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan• Kementerian Agama• Kementerian PPN/Bappenas• LPSK		
21.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola UPTD PPA serta Kader PATBM	Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik No: 8/Ses/KPPPA/DepIII/03/2019 dan No:011.MOU.III.2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Yayasan Sayangi Tunas Cilik	2020	Dalam tahap pembahasan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Perlindungan Anak.				
22.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak tentang Peran Serta dalam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Upaya perlindungan terhadap anak (termasuk Anak yang dalam kategori Memerlukan Perlindungan Khusus/AMPK) dari bahaya dan dampak yang ditimbulkan wabah COVID-19 saat ini menjadi salah satu fokus utama Kemen PPPA.• Diperlukan peran serta berbagai pihak termasuk lembaga masyarakat dalam penanganan dan pendampingan bagi anak penyandang disabilitas seperti tentang etika, protokol, maupun tata caranya sehingga dilakukan Kerja Sama.	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Lembaga Masyarakat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA)	2020	Dalam tahap penyusunan draft.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK						
23.	Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Delegasi Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Sesdep Bidang Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian PPN/Bappenas• Kemenko Bidang PMK• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Sekretariat Negara• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Perhubungan• Kementerian Sosial• Kementerian PUPR• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan• Kementerian Agama• Kementerian Kesehatan• KPAI• Pemerintah Daerah	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap pengesahan.• Tertahan oleh Kemenko Bidang PMK sejak tahun 2018.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT						
24.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">• Perlu memperjelas mekanisme/tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat.• Disesuaikan dengan kebutuhan tentang bagaimana melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kepada Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) di daerah.	Sesdep Bidang Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Keuangan• Kementerian Dalam Negeri• Organisasi Masyarakat	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan.• Luncuran tahun 2019.
25.	Perjanjian Kerja Sama dengan KADIN tentang Peran Serta Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none">• Perlunya kerja sama dengan dunia usaha salah satunya dengan KADIN untuk mensinergikan program-program terkait pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.• Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan;- memperbanyak	Asdep Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• KADIN	2020	Dalam tahap perencanaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		perempuan di lapangan kerja; - mengurangi pekerja anak; dan - adanya pelatihan kewirausahaan.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
INSPEKTORAT						
26.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	<ul style="list-style-type: none">• Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.• Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses, dan memulihkan kerugian negara yang terjadi di	Inspektorat	Internal Kemen PPPA	2020	Dalam tahap penyusunan draft.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		lingkungan Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUKUM DAN HUMAS (TIDAK ADA PENGAJUAN)						

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO UMUM DAN SDM						
27.	Peraturan Presiden tentang Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan fungsi Kemen PPPA.• Mencabut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kemen PPPA.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian PAN-RB• Kementerian Keuangan• Kementerian Sekretariat Negara	2020	Dalam tahap penandatanganan.
28.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA	Sebagai dasar pembayaran gaji dan pemberian tunjangan kinerja.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM	2020	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PAN-RB• Kementerian Keuangan		tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA.
29.	Peraturan Menteri PPPA tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none">• Menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Kemen PPPA yang baru, amanat Pasal 38.• Mencabut Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian PAN-RB• Kementerian Keuangan• Kementerian Hukum dan HAM	2020	Dalam tahap perencanaan.
30.	Peraturan Menteri PPPA tentang Proses Bisnis Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none">• Amanat Pasal 77 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.• Mencabut Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Bisnis Proses Kemen PPPA.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian PAN-RB• Kementerian Keuangan• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Sekretariat Negara• Kemenko Bidang PMK	2020	Dalam tahap perencanaan.
31.	Peraturan Menteri PPPA tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di	Menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Kemen PPPA dan SOTK Kemen PPPA yang baru.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian PAN-RB• Kementerian Keuangan• Kementerian Hukum dan HAM	2020	Dalam tahap perencanaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Lingkungan Kemen PPPA					
32.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang PPPA	Menyesuaikan dengan perubahan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga struktur organisasi Dinas PPPA tepat fungsi dan tepat proses.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Hukum dan HAM• Dinas PPPA	2020	Dalam tahap perencanaan.
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang NSPK Urusan PPPA	Merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Dalam Negeri• Dinas PPPA	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan.• Merupakan gabungan dari:<ol style="list-style-type: none">1. RPermen PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kualitas Keluarga;2. RPermen PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;3. RPermen PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan;4. RPermen PPPA tentang Pedoman Perlindungan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
						Khusus Anak; dan 5. RPermen PPPA tentang Pemenuhan Hak Anak.
34.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kemen PPPA	Perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan di internal Kemen PPPA.	Bagian Keuangan dan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• ANRI• Kementerian Hukum dan HAM	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan.
35.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kamus Kompetensi Kemen PPPA	Untuk menghasilkan kinerja SDM yang optimal diperlukan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki SDM dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengisi suatu pekerjaan/jabatan.	Bagian Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kemen PANRB• BKN• ANRI• Kementerian Hukum dan HAM	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO PERENCANAAN DAN DATA						
36.	Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap K/L termasuk Kemen PPPA untuk menyusun rencana strategis setiap 5 (lima) tahun.• Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024.	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Keuangan• Kementerian PPN/Bappenas• Kementerian PANRB• Kementerian Hukum dan HAM	2020	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024.
37.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum	<ul style="list-style-type: none">• Perlunya mengakomodir bantuan untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.• Menambahkan jenis	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Keuangan• Kementerian Hukum dan HAM• Kementerian Sosial	2020	Dalam tahap penyusunan draft.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di lingkup Kemen PPPA	bantuan spesifik terhadap perempuan dan anak.				
38.	Peraturan Menteri PPPA tentang Sistem Data Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak perlu menyesuaikan dengan kebutuhan data dan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya substansi tentang kelembagaan, mekanisme/tatalaksana, dan pengelolaan data sehingga harus dicabut.Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none">Internal Kemen PPPAKementerian Dalam NegeriKementerian Hukum dan HAMKementerian PPN/ BappenasBPSDinas PPPA	2019	<ul style="list-style-type: none">Dalam tahap pembahasan.Luncuran tahun 2019.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Daerah.				
39.	Peraturan Menteri PPPA tentang Dana Alokasi Khusus Tahun 2021	Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Keuangan• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian PPN/Bappenas• Kementerian Hukum dan HAM• Dinas PPPA	2020	Dalam tahap penyusunan draft.
40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Sistem Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemen PPPA	Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kemen PANRB• Kementerian Hukum dan HAM	2020	Dalam tahap penyusunan draft.
41.	Peraturan Menteri PPPA tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA	Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• BPKP• Kementerian Hukum dan HAM	2020	Dalam tahap harmonisasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
42.	Peraturan Menteri PPPA tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2014	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai Bagian dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.• Melanjutkan Road Map Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2015-2019.	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian PANRB• Kementerian Hukum dan HAM	2020	Dalam tahap perencanaan.
43.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Pusat Investasi Pemerintah tentang Integrasi Data Kewirausahaan	Amanat Presiden tentang 5 (lima) prioritas Kemen PPPA, yang salah satunya yaitu peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan.	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Keuangan• Kementerian Sosial• Kementerian KUKM• BKKBN• PNM Mekar	2020	Dalam tahap perencanaan.
44.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan BPS tentang Pertukaran Data dan Informasi	Memperbarui kesepahaman bersama yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 November 2014.	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• BPS	2020	Dalam tahap penandatanganan.
45.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang	<ul style="list-style-type: none">• Mempermudah aksi approval dokumen atau untuk suatu tahapan proses.• Untuk tahap awal	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSRe)	2020	Dalam tahap pengesahan (menunggu jadwal penandatanganan serentak dengan KL lain).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kemen PPPA	diimplementasi dalam proses tata naskah dinas melalui layanan berbasis elektronik <i>e-office</i> dan <i>simpeg</i> .				
46.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan	Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Nomor: 130/KPPPA/Roren&Data/12/2019; Nomor: 08/KNAKTP/MoU/XII/2019; Nomor: 01/MoU/FPL/XII/2019.	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Komnas Perempuan• Forum Pengada Layanan	2020	<ul style="list-style-type: none">• Dalam tahap penandatanganan.• Luncuran tahun 2019.
47.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan	Perlunya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang koperasi dan usaha	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kemen PPPA• Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dalam tahap penandatanganan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	mikro, kecil dan menengah.				
48.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT XL Axiata tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlunya sinergi dalam rangka peran serta penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Kemen PPPA • PT XL Axiata, Tbk 		Dalam tahap pembahasan.

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA						
49.	Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Bertambahnya mandat dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap KPAI sehingga perlu mengubah/menambah beberapa hal: - Kepala Sekretariat masih dipimpin oleh eselon 2, padahal melihat luasnya	Sekretariat KPAI	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPPA • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian PANRB • Kementerian Keuangan • Pemerintah Daerah 	2020	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam tahap penyusunan draft. • Peraturan Presiden ini tidak masuk dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 sehingga untuk



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>cakupan wilayah tugas KPAI, diperlukan dukungan teknis dan administratif yang optimal setingkat eselon 1 agar terlaksana dengan baik;</p> <ul style="list-style-type: none">- kebutuhan SDM dalam bentuk tenaga pelaksana (tenaga ahli, asistensi, mediator, dan lainnya), yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas KPAI belum diatur padahal secara faktual komisioner memerlukan tim pelaksana untuk mendukung pelaksanaan tugas;- pengaturan tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang tumpang tindih dengan struktur organisasi Pemerintahan Daerah (instansi vertikal KPAI/Organisasi Perangkat Daerah); dan- Di dalam kelembagaan KPAD ada kelompok kerja				mendapatkan persetujuan Presiden maka harus diusulkan melalui izin prakarsa.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		(pokja) dan lain-lain sehingga harus disesuaikan terkait dengan hak keuangan KPAD dan perangkat pendukungnya.				

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI